

**KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA ADMINISTRASI PADA
PELAKU USAHA PENGIMPORAN DAN PENGEDARAN KALSIMUM
KARBIDA YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA**

Nama: Arhadina Shinta Devi, S.H.
Jurusan/Program Studi: Hukum/Magister Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing: Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisa apakah penerapan sanksi pidana administrasi pada pelaku usaha pengimporan dan pengedaran Kalsium Karbida telah menimbulkan efek jera dan telah sesuai dengan tujuan hukum berupa teori kemanfaatan serta hukum pidana dapat bertindak sebagai *primum remedium* terhadap tindak pidana mengimpor dan mengedarkan barang berupa Kalsium Karbida. Karena sanksi pidana administrasi dianggap belum memberikan manfaat hukum khususnya untuk para konsumen serta para pelaku usaha lain, maka yang bersangkutan akan dijerat dengan sanksi pidana sebagai upaya *primum remedium* untuk dapat memberikan efek jera agar tidak lagi mengimpor dan mengedarkan barang Kalsium Karbida (CaC₂) yang tidak ber-SNI. Sehingga karena perbuatannya tersebut yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 53 ayat (1) huruf (b) Jo. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian karena telah memenuhi unsur-unsur setiap pasal dan juga memenuhi unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: Sanksi Pidana Administrasi, Pengimporan dan Pengedaran Kalsium Karbida, Undang-Undang Perindustrian

***POLICY OF APPLYING ADMINISTRATIVE CRIMINAL SANCTIONS TO
BUSINESS ACTORS IMPORTING AND DISTRIBUTING CALCIUM CARBIDE
THAT ARE NOT OF INDONESIAN NATIONAL STANDARDS***

*Name: Arhadina Shinta Devi, S.H.
Department/Study Program: Law/ Master of Law
Supervisor: Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.*

ABSTRACT

The writing of this thesis aims to analyze whether the application of administrative criminal sanctions to business actors importing and circulating Calcium Carbide has caused a deterrent effect and has been in accordance with legal objectives in the form of a theory of expediency and criminal law can act as a primum remedium against the criminal act of importing and circulating goods in the form of Calcium Carbide. Because administrative criminal sanctions are considered to have not provided legal benefits, especially for consumers and other business actors, the person concerned will be entangled with criminal sanctions as an effort to provide a deterrent effect so that they no longer import and circulate Calcium Carbide (CaC₂) goods that are not SNI. So that because of his actions, the person concerned can be subject to Article 53 paragraph (1) letter (b) Jo. Article 120 paragraph (1) of Law Number 3 of 2014 concerning Industry because it has fulfilled the elements of each article and also fulfills the elements of criminal liability.

Keywords: Administrative Criminal Sanctions, Importation and Circulation of Calcium Carbide, Industry Act